

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Negara hukum dalam kekuasaan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan terjadinya hukum.

“Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja di berikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perubahan yang melanggar larangan hukum pidana. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana”¹

Peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap semua harkat martabat manusia dalam proses pidana pada hakekatnya telah dilletakkan dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan Undang-undang

¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , hal.24.

Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). “Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus segera dijalankan oleh Jaksa (putusan dari Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1958 Nomor 16 K/Kr/1958) KUHP Pasal 14 Huruf j menyatakan bahwa jaksa berwenang melaksanakan ketetapan hakim. Sejalan dengan itu ketentuan Pasal 270 KUHP Jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk melaksanakan dengan segera (Pasal 179 Ayat (3) KUHP”.²

Ketentuan mengenai hak asasi manusia sudah memiliki landasan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan ini memuat nilai – nilai kemanusiaan yang tumbuh dalam masyarakat sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan ini jaksa dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya akan selalu memperhatikan ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Ketidakpuasan Masyarakat luas terhadap putusan-putusan pengadilan selama ini, hakikatnya bertitik tolak dari ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam persamaan hukum masyarakat dengan keadilan berdasarkan yang telah digariskan dalam undang-undang”.³

Berdasarkan beberapa jenis putusan yang mengandung pembedaan salah

² Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan peran jaksa dalam pembangunan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal.56.

³ Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, hal.vii.

satunya merupakan putusan pidana atau hukuman percobaan pidana bersyarat dalam menjalani masa hukumannya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jaksa masih mempunyai wewenang pengawasan yang salah satunya merupakan pelepasan bersyarat.

Putusan adalah “hasil kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan atau lisan. Ada juga yang mengartikan putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan”.⁴

Penetapan pelepasan bersyarat dapat diberikan (oleh Menteri Kehakiman, apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiga atau sekurang-kurangnya 9 bulan sebagaimana diataur dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP yang berbunyi *“Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu di anggap sebagai satu pidana”*

“Lamanya menjalani pidana yang dimaksud ini tidak dapat termasuk lamanya masa penahanan lamanya sementara (jika belum divonis bersalah ia ditahan sementara) artinya masa lamanya penahanan sementara tidak dihitung dalam menentukan dua pertiga atau 9 bulan itu, walaupun dalam putusan hakim selalu ditetapkan bahwa pidana yang mengusulkan pada menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena

⁴ Marpaung Leden, 1995. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta. Sinar Grafika.hal. 36

dinilai telah berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (1) KUHP untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat”.⁵

“Kejaksaan adalah instansi yang berhak melakukan putusan pengadilan dalam lingkup pidana (*executive ambtenaar*)”.⁶ “Sebelum melaksanakan putusan pengadilan jaksa di haruskan melakukan penuntutan terlebih dahulu. Penuntutan adalah awal pemeriksaan didalam pengadilan yang dilakukan hakim untuk membuat suatu putusan”.⁷

Beberapa mengenai penegakan hukum khususnya para jaksa maka tidak dapat melepaskan kaitannya dengan masalah penegakan hukum dan yang dijadikan sorotan tidak hanya sebagaimana adilnya melaksanakan norma-norma hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia saja melainkan sorotan utamanya pada bagaimana para jaksa dalam pembangunan ini yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan didalam menegakkan hukum. Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai pengawasan Jaksa terhadap narapidana yang memperoleh pelepasan bersyarat ke dalam sebuah judul skripsi dan judul **“PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN NARAPIDANA YANG DIBERIKAN PELEPASAN BERSYARAT DI KABUPATEN SRAGEN DALM PRESKTIF HAM (Studi kasus Kejaksaan Negeri Sragen)”**.

⁵ Adami Chazawi , Op.Cit.,hal.63.

⁶ Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 36

⁷ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, hal, 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur atau bentuk pengawasan jaksa dalam pengawasan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat menurut perspektif HAM di kabupaten Sragen?
2. Bagaimana upaya Jaksa dalam mengantisipasi adanya kendala dalam pengawasan narapidana yang mendapat pelepasan bersyarat?
3. Apa tujuan diberikannya pelepasan bersyarat bagi narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur dan bentuk pengawasan jaksa dalam mengawasi narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat menurut perspektif HAM di kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui tujuan diberikannya pelepasan bersyarat bagi narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana.

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengawasan jaksa terhadap narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat.
- c. Memberikan Sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat banyak dalam menyikapi hal seperti ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat banyak dalam menyikapi hal seperti ini.

E. Kerangka Pemikiran

Hakim dalam memerintahkan putusan pembedanaan dalam hal :

1. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana (melanggar syarat umum)
2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melanggar syarat khusus.
3. Jika sebelum lewatnya masa percobaan terbukti telah dipidana dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak pidana.
4. Setelah lewat masa percobaan itu berakhir dengan suatu putusan pembedanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Penjabat yang memberikan perintah agar pidana dijatuhkan adalah hakim yang telah menjatuhkan pidana pada tingkat pertama (hakim pada pengadilan negeri yang bersangkutan) karena walaupun perkara itu naik banding atau kasasi, pelaksanaan putusan pidana dengan bersyarat itu tetap

pada hakim pengadilan tingkat pertama”.⁸ Untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat juga didasarkan atas pertimbangan antara lain yaitu :

1. Sifat tindak pidana yang dilakukan
2. Pribadi dan riwayat hidup (latar belakang kehidupan) narapidana
3. Kelakuan narapidana selama pembinaan.
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia di bebaskan.
5. Penerimaan masyarakat dimana ia akan bertempat tinggal.

Narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat diberikan surat-surat lepas dimana didalamnya dimuat syarat-syarat yang harus ditaatinya selama masa percobaan tersebut. Bilaternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut maka pelepasan tersebut dapat dicabut. “Pencabutan pelepasan bersyarat ini dibuat oleh menteri kehakiman atas usul atau setelah dari jaksa tempat asal terpidana dan setelah mendapat keterangan dari Dewan Reklasering (BISPA) (Pasal 15 Ayat 2 KUHP)”⁹ yang berbunyi “*Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta di tetapkan syarat-syarat yang harus di penuhi selama masa percobaan.*”

⁸ K. Wantjik Saleh, 1977, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 45.

⁹ *Ibid*, hal. 63-64.

Selanjutnya, untuk melaksanakan “tugas dan wewenang Kejaksaan adalah menjadi kewakiban bagi setiap bandan negaa terutama dalam bidang penegakan hukum dan keadilan untuk melaksanakan dan membina kerjasama yang dilandasi semangat keterbukaan kebersamaan dan keterpaduan dalam suasana keakraban guna mewujudkan sistem peradilan. Kerjasama antara kejaksaan dengan instansi penegak hukum”.¹⁰ “Kekuasaan dan wewenang aparat kejaksaan di Indonesia telah tercantu dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sampai sekarang masih berlaku”.¹¹

F. Metode Penelitian

“Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang di peroleh dari suatu permasalahan tersebut”.¹² Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris; Yuridis empiris adalah

¹⁰ Suharto RM, 2006, *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 20.

¹¹ Ilham Gunawan, 1994, *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 60.

¹² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 1.

pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat dalam sistem kehidupan yang diperoleh langsung dari obyeknya¹³.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah maka penulis menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Sragen sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data.

4. Jenis data dan Sumber Data

Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data di lapangan dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 67

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas tersebut terdiri dari: (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, (d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan (f) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum”.¹⁴ Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 118.

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun petunjuk yang digunakan adalah kamus hukum”.¹⁵

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

“Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Semua yang ada di atas tersebut dipakai sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian”.¹⁶

b. Wawancara

“ Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian secara lisan dengan cara bertatap muka secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan penting dari masalah yang diteliti”.¹⁷ Dimana dalam wawancara ini penulis memberikan beberapa pertanyaan terkait obyek yang diteliti untuk dijadikan data hasil penelitian. Adapun tempat wawancara pada penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Sragen.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal.32.

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Op. Cit.*, hal 32

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, hal

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari rekaman, wawancara, pengamatan, atau bahan tertulis (undang-undang, dokumen, buku dan sebagainya, maka teknik data yang digunakan oleh penulis berupa analisis kualitatif yaitu penyajian data yang dideskripsikan dalam bentuk *essay* dengan kalimat yang cukup panjang yang bersifat membahas dan menguraikan permasalahan yang penting. Bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang berkaitan dengan pengawasan Jaksa terhadap narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat menurut perspektif HAM.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

Pendahuluan, yang didalamnya berisikan tetatng latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Tinjauan Pustaka, yang di dalamnya berisikan mengenai pengertian, fungsi dan peran Kejaksaan, pengertian, fungsi dan peran jaksa, pengertian pelepasan bersyarat, bentuk dan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh jaksa, serta dasar hukumnya.

Mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang diperoleh penulis serta pembahasan tentang permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari akhir penelitian.